

## **ARTIKEL OPINI HUKUM JDIH**

### **BEDAH PP 28/2025 SEBAGAI ATURAN BARU PENYELENGGARAAN IZIN USAHA**

Penulis: SIP Law Firm

Tahun Penulisan: 2025

#### **ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hadir sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Transformasi regulasi ini memberikan penyesuaian tata kelola perizinan melalui penyempurnaan mekanisme *Online Single Submission* (OSS), penguatan kategori tingkat risiko usaha, serta peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Artikel ini membedah substansi PP 28/2025 dengan menekankan urgensi perubahan, dampak terhadap prosedur perizinan, dan implikasi terhadap iklim usaha nasional.

Kata kunci: PP 28/2025, perizinan berusaha, OSS, tingkat risiko, kemudahan berusaha.

#### **PENDAHULUAN**

Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan memangkas hambatan birokrasi yang menghalangi investasi dan kegiatan usaha. Sistem OSS yang diperkenalkan sejak 2021 melalui PP 5/2021 menjadi langkah awal digitalisasi layanan perizinan nasional. Namun, dinamika investasi dan kebutuhan penyesuaian regulasi menuntut penyempurnaan.

Lahirnya PP 28/2025 menegaskan arah baru penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dengan memperjelas klasifikasi risiko, penyederhanaan standar usaha, dan mekanisme perizinan elektronik yang lebih terintegrasi. Aturan ini diposisikan untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas bagi pelaku usaha.

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Penyempurnaan Sistem OSS dan Klasifikasi Tingkat Risiko**

PP 28/2025 memperkuat kerangka perizinan berbasis risiko melalui kategorisasi empat tingkat risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Perizinan untuk tingkat risiko rendah cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara tingkat menengah hingga tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha, verifikasi teknis, atau sertifikat standar sesuai tingkat risikonya.

## 2. Perubahan Substansi dari PP 5/2021 ke PP 28/2025

Beberapa penyempurnaan utama meliputi:

- Harmonisasi aturan sektoral dan perizinan daerah.
- Integrasi perizinan berbasis risiko dengan registrasi perizinan lingkungan, bangunan gedung, dan ketenagakerjaan.
- Peningkatan validasi dokumen secara sistem elektronik untuk mengurangi pertemuan fisik dengan petugas.

## 3. Dampak terhadap Pelaku Usaha

Pelaku usaha mendapatkan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya serta peningkatan transparansi. Namun transisi menuju sistem yang semakin digital menuntut kesiapan pelaku usaha dalam hal literasi teknologi dan kepatuhan pelaporan elektronik.

## 4. Peran Pemerintah Daerah

PP 28/2025 menempatkan pemda sebagai aktor penting dalam pengawasan, pembinaan, dan penerbitan perizinan berbasis risiko. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi ini.

## **PENUTUP**

PP 28/2025 membawa arah baru reformasi perizinan usaha di Indonesia melalui pendekatan berbasis risiko yang semakin jelas, terukur, dan adaptif. Digitalisasi proses melalui OSS mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas perizinan. Namun, efektivitas penuh regulasi membutuhkan kesiapan infrastruktur, SDM, dan koordinasi lintas sektoral. Implementasi PP 28/2025 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem kemudahan berusaha dan menarik investasi berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI**

1. Republik Indonesia. 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. SIP Law Firm. 2025. "Bedah PP 28/2025 sebagai Aturan Baru Penyelenggaraan Izin Usaha." *SIP Law Firm — Analisis Kebijakan Perizinan*.

3. Hukumonline. 2025. "PP 28/2025 Hadirkan Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha."
4. BKPM (Kementerian Investasi). 2025. Publikasi Sistem OSS RBA — Pemutakhiran Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko.